

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

**PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAHDI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Topan Angker¹

Agus Subagyo²

Danny Permana³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : topanangker@gmail.com

Abstrak

Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dilaksanakan, yang berarti mengevaluasi kinerja kerja dan, jika perlu, melaksanakan tindakan korektif agar hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berdasarkan hal ini, para peneliti didorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan pengaruh pengawasan inspektorat daerah terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan. Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan jenis penelitian metode survei dan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua SMAN dan SMKN yang menerima program Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023. Ukuran sampel ditentukan menggunakan pengambilan sampel acak terstratififikasi proporsional dengan ukuran sampel sebanyak 153 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat. Nilai t yang dihitung diperoleh $(68.627) > t$ tabel (1.66501) dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$, yang berarti hipotesis dalam studi ini menerima H_a dan menolak H_0 . Uji ini secara statistik membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat. Besar pengaruh pengawasan Inspektorat berdasarkan koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,970 atau 97%, yang berarti bahwa besar pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat adalah 97% sementara 3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat Daerah, Efektivitas, Dana Bantuan Operasional Sekolah

Abstract

Supervision is determining what has been implemented, meaning evaluating work performance and, if necessary, implementing corrective actions so that the results of the work are in accordance with the plans that have been determined. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the influence of regional inspectorate supervision on the effectiveness of aid fund management. School Operations (BOS) in West Bandung Regency. This research aims to determine and analyze the influence of Regional Inspectorate supervision on the effectiveness of BOS Fund management in West Bandung Regency. The research method used is explanatory with a survey method research type and a quantitative research approach. Data collection methods were carried out through literature studies and field studies, namely using questionnaires. The population in this study were all SMAN and SMKN that received the BOS Fund program in West Bandung Regency in 2023. The sample size was determined using proportionate stratified random sampling with a sample size of 153 respondents.

The results of the research show that hypothesis testing proves that the supervision of the Regional Inspectorate has an influence on the effectiveness of BOS Fund management in West Bandung Regency. The calculated t value was obtained ($68.627 > t$ table (1.66501)) with a significance level of $0.000 < 0.05$, which means the hypothesis in this study accepts H_a and rejects H_0 . This test statistically proves that the supervision of the Regional Inspectorate has a significant effect on the effectiveness of BOS Fund management in West Bandung. The magnitude of the influence of Inspectorate supervision based on the coefficient of determination obtained is 0.970 or 97%, meaning that the magnitude of the influence of Regional Inspectorate supervision on the effectiveness of BOS Fund management in West Bandung Regency is 97% while the remaining 3% is influenced by other variables that were not studied.

Keywords: *Supervision, Regional Inspectorate, Effectiveness, School Operational Assistance Funds*

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidikan. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun). Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa: pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam Ayat 3 menyebutkan bahwa: wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah akan mempersiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp. 660,8 triliun atau 20% pada APBN 2024. Anggaran itu terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp. 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp. 77,0 triliun. Anggaran pendidikan sebesar itu meningkat dibanding anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai Rp. 612,2 triliun. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; dan peningkatan kualitas PAUD. Selain itu, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan koneksi keterkaitan Pendidikan vokasi dengan pasar kerja (puslapdik.kemendikbud.go.id).

Meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) merupakan dana bantuan pemerintah di bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya program “Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu”.

Penerima Dana BOS Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, Satuan Pendidikan yang menerima dana BOS terdiri dari:

- a. Sekolah Dasar (SD)
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Sekolah Menengah Akhir (SMA)
- d. Sekolah Luar Biasa
- e. Sekolah Menengah Kejuruan

Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah. Setiap sekolah di Indonesia berhak menerima dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Besaran dana yang diterima oleh setiap sekolah juga bervariasi tergantung dari tingkatan satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan utama peneliti menggunakan metode penelitian *explanatory* ialah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan analisis kuantitatif. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner (angket) adalah instrumen yang berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya (Sanjaya, 2015:255). Kuesioner yang disebarluaskan nantinya menggunakan media penyebaran *Google Form* (GF). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah (variabel independen) terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (variabel dependen)

Desain Penelitian

Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

Variabel bebas: Pengawasan Inspektorat Daerah, dengan dimensi syarat-syarat pengawasan, yaitu :

- Pengawasan dilaksanakan untuk mengukur dan memastikan dilaksanakannya pengelolaan Dana BOS.
- Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya, dengan indikator:
- Mencari informasi hasil pemantauan kegiatan program pengelolaan Dana BOS di lapangan.
- Pelaporan atas hasil kegiatan pemantauan program Dana BOS. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan pada hal-hal yang penting, dengan indikator:
- Dapat menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS.
- Menindaklanjuti terhadap penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

KERANGKA TEORI

Program dana BOS merupakan program realisasi atau pengimplementasian suatu kebijakan yang bertujuan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) Sembilan tahun. Konsekuensi dari apa yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menuntut Pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa dibebani oleh biaya pendidikan.

Bentuk dan tata cara kepala sekolah dalam mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dalam mengelola dana tersebut. Kepala Sekolah yang profesional harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola keuangan sekolah, seperti mempersiapkan tahapan-tahapan dalam pengimplementasian dana seperti adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pertanggung jawaban. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan terhadap pembiayaan atau yang biasa dikatakan sebagai penganggaran. kemampuan yang dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan bentuk upaya yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS.

Salah satu fungsi manajemen agar organisasi berjalan secara efisien yaitu dengan adanya itu fungsi *controlling*. Pengawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang bisa mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Fayol (dalam Fadillah, 2019: 22) mengartikan pengawasan sebagai berikut: “pengawasan mencangkup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadianya dikemudian hari”.

Pentingnya pengawasan terkait kegunaan serta pengelolaan dana BOS semata-mata dilakukan agar dapat terhindar dari perbuatan penyimpangan serta hal-hal lainnya diluar dari komponen pembiayaan dan perencanaan dalam pemenuhan segala kebutuhan sekolah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan dana BOS. pengalokasian dana dengan jumlah yang tidak

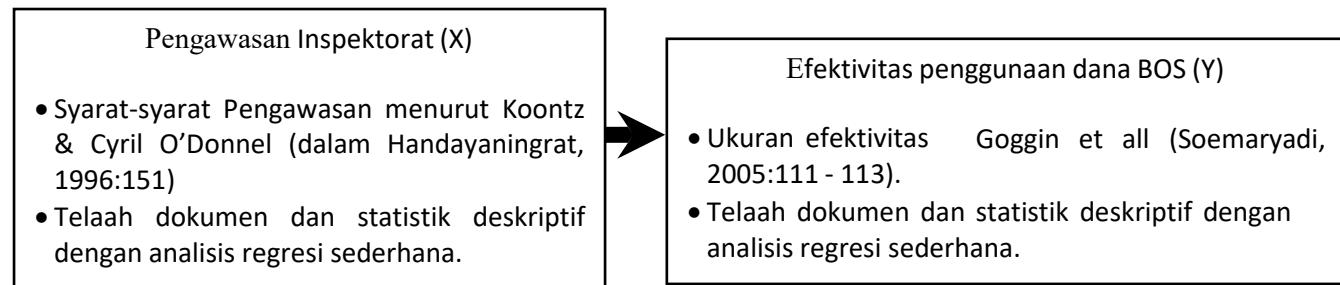
Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

sedikit tersebut rawan akan adanya tindakan penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan peruntukannya maka oleh karena itu diperlukan upaya pengawasan agar penyelenggarannya berjalan efektif dan efisien serta meminimalkan permasalahan dalam pembuatan laporannya demi terwujudnya Pemerintahan yang baik.

Kerangka Pemikiran



Teknik Penarikan Sampel

Dari hasil perhitungan total sampel tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah sampel (ni) menggunakan rumus *proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu:

$$Ni$$

$$ni = \frac{N}{n}$$

$$N$$

Keterangan:

ni = jumlah sampel menurut strata

N = jumlah populasi seluruhnya

Ni = jumlah populasi menurut strata

n = jumlah sampel menurut slovin

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024***Jumlah Sampel Penelitian**

No	Sampel	Populasi	Perhitungan	Sampel
1	Kepala Sekolah SMANDan SMKN	26	26/249 x 153	16
2	Bendahara Sekolah	26	26/249 x 153	16
3	Ketua Komite Sekolah	22	22/249 x 153	13
4	Tata Usaha	128	128/249 x 153	79
5	Guru	47	47/249 x 153	29
	Jumlah populasi	249	Jumlah Sampel	153

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui perhitungan sah dan benar untuk suatu kuesioner. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis butir-butir setiap pertanyaan kuesioner. Untuk menguji validitas setiap butir maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total dengan menggunakan teknik korelasi *pearson product moment* dengan bantuan program *Statistical Program for Social Science* (SPSS).

PEMBAHASAN

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan bahwa terdapat 50% indikator makro yang telah mencapai target yaitu ($>100\%$) dan sisanya hampir mencapai target.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Indikator makro yang mencapai target antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan perkapita dan indeks gini ratio, sedangkan indikator makro yang hampir mencapai target adalah laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat, susunan organisasi Inspektorat Daerah menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 Tahun 2019, terdiri atas:

1. Inspektur Daerah;
2. sekretariat, membawahkan:
 - a Subbagian perencanaan;
 - b Subbagian evaluasi dan pelaporan; dan
 - c Subbagian administrasi dan umum.
3. Inspektur pembantu wilayah I;
4. Inspektur pembantu wilayah II;
5. Inspektur pembantu wilayah III;
6. Inspektur pembantu wilayah IV;
7. Inspektur pembantu bidang khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepagawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang administrasi dan umum;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang administrasi umum; dan

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang administrasi umum.

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Administrasi dan Umum;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang administrasi dan umum;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang administrasi dan umum;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Inspektorat Daerah;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang administrasi dan umum;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan umum;

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

kemasyarakatan.

Inspektor Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai rincian tugas sebagaimana berikut:

- a. melaksanakan pengkajian program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- c. melaksanakan pengkajian bahan pengawasan dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada masing-masing wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada masing-masing wilayah kerjanya;

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan Inspektorat Daerah dalam program dana BOS berdasarkan syarat-syarat pengawasan termasuk dalam predikat cukup baik dengan persentase nilai rata-rata 66.35% (52.01% - 68.00%). Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa penilaian terhadap pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam program dana BOS termasuk dalam kategori cukup baik.
2. Efektivitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan ukuran efektivitas termasuk dalam predikat cukup baik dengan persentase nilai rata-rata 67.54% (52.01% - 68.00%). Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa penilaian terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori cukup baik.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat. Diperoleh nilai t hitung ($68.627 > t$ tabel (1.66501)) dengan taraf signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 . Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

pengelolaan Dana BOS di Bandung Barat.

4. Besarnya pengaruh pengawasan Inspektorat berdasarkan nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0.970 atau 97%, artinya besarnya pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bandung Barat sebesar 97% sedangkan sisanya sebesar 3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrusi, Fahmi. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Anggraini, Jum. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dukun, Suyono. 2003. *Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama, dan PascaKrisis*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Ehworm. 2008. *Queensland Government. [Home page of Queensland Health]*. Available at:
http://www.health.qld.gov.au/ehworm/waste_management/role_local_gov.asp. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- Fadillah, Amin. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: UB Pres.
- Fachruddin, Imam. 2009. *Desain penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- FitzGerald Jerry, Andra F FitzGerald, Warren D. Stallings, Jr. 1981. *Fundamentals of systems analysis (edisi kedua)*. New York: John Willy & Sons.
- Handayaningrat, Suwarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kusnadi, Ady et al, 2002. *Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manulang, M. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pegawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernetologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

-
- _____. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Seri Ilmu Pemerintahan, Pelayanan Publik & Customer Satisfaction, Prinsip-prinsip Dasar Agar Pelayanan Publik Lebih Berorientasi Pada Kepuasan dan Kepentingan Masyarakat, Cetakan Kesatu*. Bandung: Alumni.
- Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Genesis.
- Plummer, J. 2000. *Municipalities and Community Participation : a sourcebook for Capacity Development*. London: Farthsca.
- Rahmah, Nidaur. 2019. *Tugas, Fungsi dan Peran APIP Ssuai Permendagri*.
<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/02/tugasfungsi-dan-peran-apip.html>. Diakses tanggal 16 Mei 2024.
- Retnami, Setya. 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Riduwan dan Akdon. 2006. *Rumus dan Data Dalam Apikasi Statistika*. Bandung : Alfabeta.
- Tika, Moh. Pabundu. 2014. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya. 2015. *Model Pengajaran Dan Pembelajaran*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Satyawan, Muhammad Aqly. 2007. *Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus: Pengembangan Pengelolaan Sampah Di Kota Parepare)*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*.edisi revisi. Jakarta.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekarno, Kartowardoyo. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Soemaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Impelmentasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sufian. 2003. *Manajemen Strategi Pembangunan Daerah dan Perdesaan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung:

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Alfabeta.

- _____. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PTRineka Cipta.
- _____. 2010. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Terry, George. 2006. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal:

- Rakhmawati, I., & Kudus, I. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi*. 1(1)
- Adil, M., & Winarsih, E. 2019. *Pengaruh Kinerja Sosial Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pt. Indonesia Power*. AJAR, Volume 2, Nomor 2.

Dokumen:

- Undang Undang Dasar 1945. Eksemplar Lepas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Eksemplar Lepas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Eksemplar Lepas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Aparat Pengawasan Internal Pemerintah*. Eksemplar Lepas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang *Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah*. Eksemplar Lepas.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang *Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya*. Eksemplar Lepas.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

63 Tahun 2022 tentang *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. Eksemplar Lepas.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang *Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Eksemplar Lepas.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 Tentang *Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023*. Eksemplar Lepas.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*. Eksemplar Lepas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat*. Eksemplar Lepas.